

Analisis Efektivitas Penggunaan SIPD dalam Mendukung Transparansi Keuangan pada Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara

Amiroh Kamilah Namora Lubis*, Yetty Sembiring, Fitri Yull Dewi Martha, Rozali Ilham
Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Agam, Sumatera Barat
Jl. Raya BUKitinggi-Payakumbu, Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam,
Sumatera Barat, Indonesia

*amirohnamora@gmail.com

Kata Kunci:
SIPD;
pengelolaan
keuangan daerah;
transparansi;
akuntabilitas;
evaluasi sistem

Abstrak Kegiatan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kecamatan Padangsidimpuan Utara. Fokus utama Pengabdian adalah menelaah kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna, kemudahan penggunaan, kecepatan input data, serta identifikasi kendala teknis dan koordinasi antarbagian. Metode yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan observasi langsung dan partisipatif selama masa magang. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa SIPD telah mampu menyediakan fitur dasar pelaporan keuangan secara cukup efektif, seperti audit trail dan sistem verifikasi data. Namun, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan integrasi data, kendala jaringan dan perangkat, minimnya pelatihan teknis bagi staf, serta kurang optimalnya koordinasi antarunit kerja. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) juga mengungkapkan bahwa tingkat realisasi anggaran beberapa program masih rendah, yang mencerminkan perlunya peningkatan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan temuan tersebut, penulis merekomendasikan perlunya peningkatan pelatihan SIPD, penguatan koordinasi internal, serta optimalisasi infrastruktur pendukung agar sistem dapat berjalan lebih efisien dan transparan di masa mendatang.

Keywords:
SIPD;
regional financial
management;
transparency;
accountability;
system evaluation

Abstract This study aims to evaluate the effectiveness of the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) in supporting transparency and accountability in financial management at the sub-district level, particularly in Padangsidimpuan Utara Sub-district. Through direct observation during an internship program, this study identifies key aspects of SIPD usage, including system alignment with user needs, interface usability, data input speed, reporting transparency, and the availability of verification and validation features. The evaluation results indicate that while SIPD meets the basic needs of financial reporting and provides an audit trail feature, the system still faces several technical challenges, such as limited data integration, server disruptions, and delays in data input due to suboptimal interdepartmental coordination. Furthermore, the evaluation of the previous year's Work Plan (Renja) implementation revealed gaps between budget targets and actual realizations, serving as a critical basis for future system and workflow improvements. Therefore, enhanced training, technical support, and better coordination systems are needed to optimize the overall utilization of SIPD.

PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah di Indonesia dituntut untuk menjalankan tata kelola keuangan secara transparan, akuntabel, efisien, dan efektif guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Sundari, Woro Astuti, and Endarti 2024). Untuk mencapai hal itu, pemerintah mengembangkan berbagai sistem informasi yang dapat menunjang proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah secara terintegrasi dan digital (Vitriana, Agustiawan, and Ahyaruddin 2022).

Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 (Asrif 2019). SIPD merupakan sistem yang dirancang untuk menyatukan seluruh data pembangunan dan keuangan daerah dengan data pemerintah pusat secara real-time, sehingga mendukung perencanaan dan penganggaran yang terstandarisasi, efisien, dan dapat diawasi publik (Nasution and M.Si 2021).

Landasan hukum penerapan SIPD berjenjang dari yang paling tinggi hingga teknis, yaitu: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 6) Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD (Wuryandanu and Arifin 2024).

Tujuan utama dari SIPD adalah untuk menyinkronkan tahapan perencanaan dan penganggaran di seluruh level pemerintahan secara digital dan akurat. Sistem ini memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kegiatan

dan Anggaran (RKA), dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) secara sistematis, terdokumentasi, dan mudah diaudit (Balqis and Fadhly 2021).

Namun dalam implementasinya, SIPD menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknologi informasi, infrastruktur yang belum merata (seperti jaringan internet), kendala teknis aplikasi, hingga kurangnya pelatihan dan sosialisasi. Meski demikian, manfaatnya mulai dirasakan oleh pemerintah daerah, seperti proses kerja yang lebih terstruktur, peningkatan akurasi data, serta penguatan koordinasi antara pusat dan daerah (Fitriaty and Saputra 2022).

Untuk memahami lebih dalam efektivitas SIPD, pendekatan analisis digunakan. Gorys Keraf (2004:67) menyatakan bahwa “Analisis merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menguraikan suatu permasalahan ke dalam elemen-elemen yang saling terhubung dan membentuk satu kesatuan yang utuh.” Pendekatan ini menjadi dasar dalam mengkaji sejauh mana sistem SIPD telah mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Balqis, Fadhly, and Az 2021).

Berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah dilakukan oleh kalangan akademisi dan praktisi pemerintahan dalam rangka mendorong pemahaman serta keterampilan aparatur terhadap penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hasil-hasil pengabdian tersebut menunjukkan bahwa intervensi melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan peningkatan literasi digital berperan penting dalam keberhasilan implementasi SIPD di tingkat daerah, termasuk kecamatan.

Salah satu pengabdian dilakukan oleh Rizki and Sarjan (2025) yang berfokus pada pelatihan penggunaan SIPD bagi aparatur desa dan kecamatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap alur perencanaan dan penganggaran berbasis SIPD. Peserta juga mampu melakukan input data sederhana serta

memahami struktur menu aplikasi SIPD. Namun, kegiatan ini juga menemukan tantangan berupa keterbatasan perangkat keras dan kurangnya kebiasaan kerja digital yang sistematis di level pelaksana teknis.

Selanjutnya, Ekaputra (2021) melaksanakan kegiatan pendampingan penggunaan SIPD di Kabupaten Malang, khususnya dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hasil pengabdian menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur mengalami kendala dalam konversi dokumen Excel ke sistem SIPD akibat format dan nomenklatur yang tidak seragam. Tim pengabdian kemudian menyusun modul praktis dan format standar input yang membantu percepatan proses adaptasi pengguna.

Selain Itu Naida and Sartika (2024) melakukan pelatihan peningkatan kapasitas SDM pada lingkup kecamatan dan kelurahan terkait penggunaan SIPD dan sistem pelaporan keuangan lainnya. Pengabdian ini menekankan pentingnya pemahaman regulasi keuangan yang mendasari SIPD, bukan hanya aspek teknis penggunaan sistem. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa ketika pelatihan dikombinasikan dengan pembahasan kebijakan, pemahaman peserta meningkat secara signifikan dan berdampak langsung pada kualitas pengelolaan keuangan kecamatan.

Kecamatan Padangsidimpun Utara sebagai unit pelaksana teknis di Kota Padangsidimpun turut menerapkan SIPD dalam penyusunan anggaran, realisasi belanja, hingga pelaporan kegiatan. SIPD menjadi alat penting dalam mendukung proses administrasi keuangan secara digital dan tersistem. Dengan memanfaatkan sistem ini, kecamatan dapat meningkatkan keteraturan dalam pengelolaan dokumen dan data anggaran.

Sebagai praja dari program studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan, penulis memperoleh kesempatan untuk melaksanakan kegiatan magang di kantor Kecamatan Padangsidimpuan Utara, khususnya di divisi keuangan. Dalam kegiatan ini, penulis terlibat dalam proses input dan pemrosesan data dari Microsoft Excel ke dalam sistem SIPD, identifikasi komponen belanja, dan validasi dokumen agar sesuai dengan ketentuan sistem.

Melalui pengalaman ini, penulis melakukan analisis terhadap efektivitas penerapan SIPD, khususnya dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat kecamatan. Selain itu, penulis juga tertarik untuk menelaah tantangan implementasi SIPD di tengah keterbatasan sumber daya dan efisiensi anggaran. Hasil pengamatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap optimalisasi pemanfaatan SIPD serta mendukung upaya reformasi birokrasi dalam pemerintahan daerah (Dione 2020).

Melalui pengalaman magang ini, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan analisis terhadap efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), khususnya dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat kecamatan, serta menelaah tantangan implementasinya di tengah keterbatasan sumber daya dan efisiensi anggaran (Imam et al. 2023).

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menambah pengalaman dan pemahaman langsung mengenai proses pengelolaan keuangan di instansi pemerintah, terutama di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, serta mempelajari cara kerja aplikasi SIPD dalam hal input data dari Excel ke sistem, mengidentifikasi efektivitas penggunaannya dalam mendukung transparansi keuangan, serta memahami kendala-kendala yang muncul selama proses input data dan bagaimana strategi penyelesaiannya.

Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memahami proses perencanaan dan penganggaran di wilayah kecamatan melalui SIPD serta memberikan saran berdasarkan pengalaman empiris guna meningkatkan pemanfaatan sistem di masa mendatang.

Ruang lingkup kegiatan magang ini mencakup aktivitas yang berkaitan dengan proses input data keuangan dari file Excel ke dalam SIPD, proses perencanaan dan penganggaran di bagian keuangan Kecamatan Padangsidempuan Utara dalam konteks efisiensi anggaran, yang secara umum meliputi pengumpulan dan penerimaan data dari staf keuangan, penyesuaian format data Excel agar sesuai dengan sistem, proses penginputan, pengecekan dan verifikasi awal data, serta pengamatan terhadap pelaporan keuangan dan tahapan perencanaan dan penganggaran melalui aplikasi SIPD. Namun, ruang lingkup ini tidak mencakup perumusan kebijakan anggaran, pengambilan keputusan keuangan, maupun akses terhadap data yang bersifat rahasia atau internal tinggi.

METODE

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggambarkan secara mendalam efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kecamatan Padangsidempuan Utara. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara kontekstual berdasarkan pengalaman langsung selama kegiatan magang.

Berdasarkan data diperoleh melalui observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung dalam proses penginputan data keuangan dari *Excel* ke dalam sistem SIPD, validasi dokumen, serta pelaporan keuangan. Selain itu, dokumentasi terhadap berkas-

berkas administrasi keuangan serta tangkapan layar aplikasi SIPD digunakan untuk memperkuat data lapangan. Dalam proses pengumpulan data, wawancara informal dengan staf bagian keuangan juga dilakukan untuk menggali pemahaman mengenai tantangan teknis dan prosedural yang dihadapi selama penggunaan SIPD.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dimulai dengan reduksi data untuk menyaring informasi penting dari hasil observasi dan dokumentasi. Data kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang mengacu pada kerangka evaluasi yang telah ditentukan, seperti kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna, kemudahan penggunaan antarmuka, kecepatan input data, transparansi pelaporan, serta kendala teknis dan koordinasi antarbagian.

Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil observasi langsung, dokumen resmi, dan pengalaman praktis selama magang. Keterlibatan langsung peneliti dalam aktivitas administrasi juga menjadi nilai tambah dalam memperoleh data yang autentik dan mendalam. Dengan pendekatan ini, diharapkan Pengabdian dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas SIPD serta rekomendasi perbaikan yang relevan.

HASIL dan PEMBAHASAN

Hasil

Profil tempat praktik lapangan

Kecamatan Padangsidimpuan Utara, yang terletak di Kota Padangsidimpuan, merupakan bagian dari wilayah yang memiliki sejarah panjang dan kaya akan nilai budaya. Kota Padangsidimpuan sendiri dikenal dengan sebutan “Kota Salak” karena melimpahnya perkebunan salak, khususnya di daerah kaki Gunung Lubukraya. Nama kota ini berasal

dari istilah “Padang na dimpu,” yang secara harfiah berarti hamparan luas yang berada di tempat tinggi.

Pada masa lalu, kawasan ini menjadi titik persinggahan strategis bagi para pedagang dari berbagai wilayah, seperti dari Sibolga, Panyabungan, hingga Padang Bolak. Keberadaan kota ini semakin penting seiring berkembangnya aktivitas ekonomi dan sosial. Sejarah mencatat bahwa pada tahun 1821, kota ini pertama kali dibangun sebagai benteng pertahanan oleh pasukan Paderi di bawah komando Tuanku Imam Lelo, yang membentang dari Batang Ayumi hingga Aek Sibontar. Peninggalan benteng ini masih dapat ditemukan hingga kini, meskipun dalam kondisi kurang terawat. Pengaruh besar pasukan Paderi juga meninggalkan jejak signifikan dalam aspek keagamaan masyarakat yang mayoritas beragama Islam.

Pada masa penjajahan Belanda, Padangsidimpuan berfungsi sebagai pusat pemerintahan kolonial untuk wilayah Tapanuli. Beberapa bangunan peninggalan era Belanda, seperti kantor pos dan kantor polisi pusat, masih berdiri kokoh sebagai saksi sejarah, dan berbagai arsip foto kota ini juga tersimpan di museum Leiden, Belanda.

Pada awalnya, status Padangsidimpuan adalah Kota Administratif berdasarkan PP No. 32 Tahun 1982, namun kemudian resmi ditetapkan sebagai Daerah Otonom melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2001, yang merupakan hasil pemekaran dari lima kecamatan di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, termasuk Kecamatan Padangsidimpuan Utara. Bagian ini harus menjadi interpretasi hasil pekerjaan (bukan pengulangan) dalam konteks pengabdian sebelumnya. Hindari referensi literatur yang diterbitkan secara berlebihan.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kota Padangsidimpuan memiliki visi yang kuat, yakni “Padangsidimpuan yang berkarakter, bersih, aman, dan sejahtera.” Visi ini

mencerminkan upaya menciptakan kota dengan identitas yang kuat melalui keberagaman budaya, adat, agama, dan kesenian sebagai aset pembangunan. Kota yang bersih dimaknai sebagai ruang yang sehat dan harmonis; aman berarti kota yang bebas dari kekhawatiran dan ancaman; sementara sejahtera menggambarkan masyarakat yang unggul secara spiritual dan material, dengan akses terhadap pendidikan, iman, ilmu pengetahuan, dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan sejumlah misi strategis, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui integrasi IMTAQ dan IPTEK, penciptaan lapangan kerja melalui iklim investasi yang kondusif serta penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur dan sarana kesehatan, perbaikan pelayanan publik dengan prinsip good governance, serta pemberdayaan pemuda dan perempuan. Misi ini juga mencakup pembangunan fasilitas publik yang inklusif untuk semua lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dan penyandang disabilitas.

Secara struktural, Kecamatan Padangsidimpuan Utara memiliki organisasi pemerintahan yang terdiri dari berbagai jabatan fungsional dan struktural yang tersebar pada unit-unit kerja. Struktur organisasi mencakup jabatan strategis seperti Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian, Kepala Subbidang Pelayanan, Perlindungan, Rehabilitasi, dan Pemberdayaan Sosial, serta tenaga-tenaga fungsional seperti Penggerak Swadaya Masyarakat, Penyuluh Sosial, dan Pengelola Administrasi. Dari daftar pegawai yang tercatat, tampak bahwa kecamatan ini memiliki sumber daya manusia yang cukup beragam dari sisi latar belakang pendidikan dan kompetensi, yang mencerminkan keseriusan dalam mengelola pelayanan publik serta urusan sosial kemasyarakatan. Adanya pembagian tugas yang jelas dan terstruktur mendukung efektivitas kinerja pemerintah kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta dalam

menjalankan berbagai program pemerintahan daerah secara lebih akuntabel dan terorganisir.

Aktivitas magang I

Selama menjalani program magang di Kantor Kecamatan Padangsidimpuan Utara, penulis memperoleh penempatan pada bagian keuangan yang memiliki tanggung jawab signifikan dalam pengelolaan anggaran serta penyusunan laporan keuangan daerah. Penempatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai alur kerja yang berkaitan dengan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), khususnya dalam konteks penginputan data keuangan yang bersumber dari dokumen *Excel* ke dalam sistem SIPD secara langsung dan sistematis.

Kegiatan yang dilaksanakan selama periode magang mencakup beberapa tahapan penting. Tahap awal dimulai dengan penerimaan data anggaran serta realisasi kegiatan dari staf keuangan. Informasi yang diterima terdiri atas dokumen pendukung seperti file *Excel* dan cetakan laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing seksi atau unit kerja di kecamatan. Dokumen tersebut memuat rincian yang mencakup kode kegiatan, anggaran belanja, jenis pengeluaran, dan laporan realisasi keuangan yang telah terealisasi.



Gambar 1. Tampilan SIPD

Tahapan berikutnya adalah melakukan penyesuaian terhadap format data *Excel* agar sesuai dengan standar template yang digunakan dalam sistem SIPD. Penyesuaian ini

melibatkan penyusunan ulang struktur kolom dan baris, pengecekan kesesuaian kode anggaran, serta memastikan format angka dan deskripsi telah sesuai dengan kebutuhan sistem. Langkah ini menjadi krusial untuk mencegah kesalahan teknis saat proses unggah data ke dalam SIPD.

Setelah proses penyesuaian selesai, tahap input data dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari kegiatan yang memiliki prioritas tinggi atau tenggat waktu pelaporan yang mendesak. Input dilakukan secara manual melalui antarmuka SIPD, dengan memasukkan setiap informasi secara teliti untuk menghindari kesalahan yang dapat mempengaruhi akurasi laporan keuangan secara keseluruhan. Ketelitian dalam tahap ini menjadi sangat penting mengingat dampak langsung yang ditimbulkan dari kesalahan input data.

Selanjutnya, penulis turut terlibat dalam proses verifikasi dan validasi data bersama staf keuangan sebelum data dikirim secara final ke sistem pusat. Proses ini bertujuan untuk memastikan integritas data, baik dari segi jumlah anggaran, kesesuaian kode kegiatan, hingga kecocokan antara data elektronik dan dokumen fisik. Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka dilakukan koreksi data sebelum dikunci dan diunggah secara permanen.

Selain berpartisipasi dalam kegiatan teknis, penulis juga mengamati proses pelaporan keuangan yang dilakukan melalui SIPD, baik untuk keperluan internal kecamatan maupun pelaporan ke tingkat kota. Penulis memperoleh wawasan mengenai alur koordinasi antara bagian keuangan dan unit-unit kerja lainnya dalam pelaksanaan program pemerintahan, serta bagaimana sistem SIPD memfasilitasi proses pengambilan keputusan melalui penyediaan laporan yang akurat dan tersaji secara *real-time*.

Dari keseluruhan aktivitas magang ini, penulis memperoleh pengalaman praktis yang memperkaya pemahaman teoritis di bidang Teknologi Rekayasa Informasi

Pemerintahan, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan daerah berbasis sistem informasi. Magang ini juga memberikan gambaran nyata tentang pentingnya akurasi dan konsistensi data dalam proses administrasi keuangan, serta tantangan teknis yang dihadapi dalam penerapan sistem informasi di sektor publik.

Aktivitas magang II

Pelaksanaan Magang II di Kantor Kecamatan Padangsidempuan Utara berlangsung selama satu bulan penuh, dimulai dari tanggal 9 April hingga 9 Mei 2025. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari kerja, yaitu Senin hingga Jumat, dengan jam operasional yang telah ditentukan, yakni mulai pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB, dengan waktu istirahat dari pukul 12.00 hingga 13.00 WIB. Selama masa magang, praja senantiasa mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kehidupan Praja, yang menjadi dasar etika dan perilaku selama menjalani praktik di lapangan.

Aktivitas magang ini dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Teknis Magang II Tahun 2025 yang mencakup berbagai kegiatan, baik yang bersifat wajib maupun tambahan. Kegiatan diawali dengan proses administratif, yakni penyerahan surat pengantar magang kepada Sekretaris Daerah Kota Padangsidempuan, yang kemudian diteruskan kepada Camat di masing-masing wilayah kerja. Selanjutnya, dilakukan pembukaan kegiatan magang secara daring yang dilaksanakan di Kantor Sekretariat Daerah Kota Padangsidempuan, dengan masing-masing camat mendampingi praja yang akan bertugas di wilayahnya.

Setibanya di lokasi magang, praja melakukan koordinasi teknis dengan Camat Padangsidempuan Utara mengenai aktivitas yang akan dilakukan selama masa magang berlangsung. Penempatan praja berada di Subbagian Keuangan, di mana praja diharapkan

mampu memberikan kontribusi terhadap operasional administrasi, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan data dan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dalam prosesnya, praja mendapatkan pendampingan dari Kasubbag Keuangan sebagai pembimbing teknis lapangan, yang secara intensif membimbing penggunaan SIPD secara lebih mendalam, baik dari sisi fungsionalitas maupun kekurangan yang perlu diperhatikan dalam implementasinya.

Beberapa aktivitas signifikan yang dijalani praja selama magang antara lain adalah membantu penginputan data GU ke dalam Excel sebelum dimasukkan ke sistem SIPD, serta turut serta dalam kegiatan administratif lainnya, seperti mendampingi camat dalam berbagai rapat koordinasi di tingkat kota, salah satunya membahas efisiensi anggaran bersama BKAD. Selain itu, praja juga berkesempatan berdiskusi dengan Kepala Dinas Inspektorat terkait transparansi pengelolaan keuangan daerah dan efektivitas SIPD dalam mendukung akuntabilitas publik.

Tidak hanya terlibat dalam kegiatan teknis dan administratif, praja juga turut mendampingi Camat dalam berbagai kegiatan pelayanan publik dan koordinasi lintas sektor. Beberapa kegiatan tersebut mencakup penerimaan tamu penting, seperti penyambutan Walikota dalam pembukaan program “Eazy Passport,” serta koordinasi dengan Satpol PP dan Dinas Perizinan. Lebih lanjut, praja juga dilibatkan dalam proses penyusunan proposal masyarakat, pendampingan keberangkatan haji, dan edukasi publik mengenai persyaratan pembuatan serta perpanjangan paspor.





Gambar 2. Aktivitas magang I dan II

Dalam dimensi pembelajaran dan pembinaan, praja menjalani bimbingan akademik secara daring bersama dosen pembimbing untuk memastikan keterpaduan antara teori dan praktik. Selain itu, praja juga turut serta dalam apel pagi yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Camat, serta memberikan pendampingan kepada siswa PKL SMK dalam hal penulisan surat masuk dan keluar. Pada akhir masa magang, sebagai bentuk penghargaan dan terima kasih, praja menyerahkan kenang-kenangan kepada pihak Kantor Kecamatan Padangsidempuan Utara.

Secara keseluruhan, magang II ini memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi praja dalam memahami praktik birokrasi secara langsung, meningkatkan keterampilan administratif, serta memperluas wawasan terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi yang modern dan transparan.

Selama menjalani praktik lapangan di Kantor Camat Padangsidempuan Utara yang berlangsung selama satu bulan, terhitung sejak tanggal 9 April hingga 9 Mei 2025, kegiatan kerja dilakukan pada hari kerja, yaitu Senin sampai dengan Jumat. Adapun jam kerja dimulai pada pukul 08.00 WIB, dengan waktu istirahat antara pukul 12.00 hingga

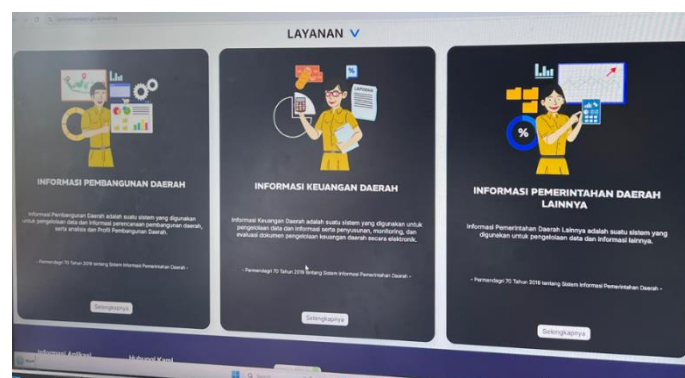
13.00 WIB, dan diakhiri pada pukul 16.00 WIB setiap harinya. Jadwal ini diterapkan secara konsisten selama pelaksanaan kegiatan Praktek Lapangan berlangsung.

Hasil PkM menunjukkan bahwa penyuluh agama dari Kantor KUA Koto Tengah melakukan pemetaan wilayah untuk menemukan lokasi yang membutuhkan pembinaan, termasuk Lembaga Pemasyarakatan (LPP) perempuan di Padang. Pada tahun 2018, pembinaan keagamaan di LPP tersebut mulai dilaksanakan dengan jadwal dua kali seminggu, masing-masing oleh Kanwil Kemenag Sumatera Barat dan KUA Koto Tengah. Pembinaan meliputi materi Al-Qur'an, tahfiz, dan sesi konsultasi, dengan tujuan agar narapidana dapat menegakkan salat, membaca Al-Qur'an, dan memperbaiki akhlak.

Materi juga disesuaikan dengan kondisi, termasuk permintaan khusus dari pihak LPP, seperti materi tentang salat bagi narapidana baru. Kesiapan penyuluh agama dalam menghadapi situasi tak terduga menjadi penting, termasuk dalam hal kolaborasi antarpenyuluh untuk saling melengkapi. Penyuluh agama juga dibagi dalam kelompok agar tugas pembinaan lebih optimal. Persiapan administratif seperti surat tugas dan absensi narapidana melengkapi tahapan persiapan sebelum pembinaan dilaksanakan di LPP.

Pembahasan

Kerangka evaluasi



Gambar 3. Layanan SIPD

Evaluasi terhadap efektivitas penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang berkaitan dengan fungsionalitas, kemudahan penggunaan, dan dampaknya terhadap pelaporan keuangan di tingkat kecamatan. Evaluasi ini bersifat kualitatif berdasarkan observasi dan pengalaman langsung selama masa magang. Adapun aspek-aspek yang dijadikan dasar dalam kerangka evaluasi ini meliputi:

1. Kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna

Menilai apakah fitur-fitur yang disediakan oleh SIPD benar-benar mendukung kebutuhan pelaporan dan manajemen keuangan di instansi pengguna, baik dari segi struktur data maupun alur proses kerja.

2. Kemudahan penggunaan dan antarmuka (user interface)

Menganalisis tingkat kemudahan dalam menggunakan aplikasi SIPD, khususnya bagi pengguna baru atau staf yang belum terbiasa dengan teknologi informasi.

3. Kecepatan proses input dan pengolahan data

Mengamati seberapa cepat sistem dapat menerima input dan memproses data, termasuk waktu respon aplikasi dan kemudahan menyimpan atau mengedit data yang sudah diinput.

4. Tingkat transparansi dalam pelaporan keuangan

Menilai sejauh mana sistem SIPD dapat menjamin akuntabilitas dan transparansi keuangan, termasuk fitur audit trail atau riwayat perubahan data.

5. Ketersediaan fitur verifikasi dan audit

Mengkaji keberadaan fitur pendukung untuk proses validasi dan verifikasi data sebelum data dikirim secara final, serta kemungkinan audit dari pihak lain.

6. Kendala teknis selama penggunaan

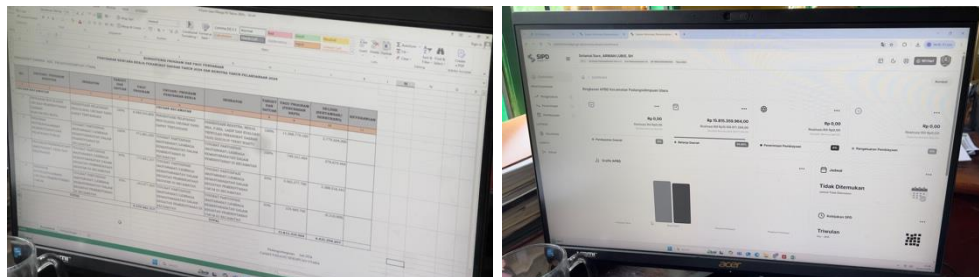
Mengevaluasi permasalahan teknis yang dihadapi selama menggunakan SIPD, seperti kendala jaringan, error sistem, maupun gangguan server.

Dengan kerangka evaluasi tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kelebihan dan kekurangan penggunaan SIPD dalam pelaporan keuangan daerah.

Evaluasi

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman langsung selama penulis melaksanakan kegiatan magang di bagian keuangan, berikut ini merupakan beberapa temuan utama yang didapatkan dalam konteks evaluasi efektivitas penggunaan SIPD di lingkungan kerja:

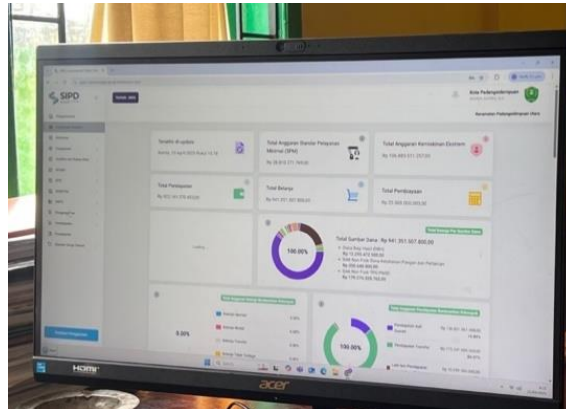
Kesesuaian sistem



Gambar 4. Sistem SIPD

Aplikasi SIPD secara umum sudah memenuhi kebutuhan dasar pelaporan keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam hal input data anggaran dan realisasi. Namun, sistem belum sepenuhnya terintegrasi dengan dokumen perencanaan atau laporan dari aplikasi lain (misalnya *Excel* atau *e-budgeting* lokal), sehingga dibutuhkan proses manual untuk menyesuaikan format data. Hal ini dapat menimbulkan risiko kesalahan input dan menghambat efisiensi kerja, terutama saat harus menghadapi tenggat waktu pelaporan.

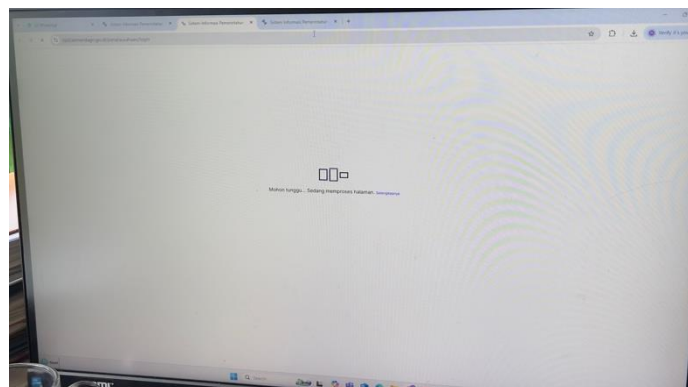
Kemudahan penggunaan dan antarmuka



Gambar 5. Tampilan *interface* sistem SIPD

Antarmuka SIPD mudah dipahami namun untuk pegawai yang sudah tergolong tua mungkin terlihat susah dan kurang praktis. Beberapa istilah teknis dan struktur halaman membuat pengguna membutuhkan waktu belajar lebih lama karena kurangnya sosialisasi mengenai penggunaan SIPD terhadap beberapa daerah mengakibatkan para staff belajar secara autodidak oleh karena itu diperlukan, pelatihan rutin/seminar dan pendampingan teknis sangat diperlukan untuk memastikan seluruh staf memahami cara kerja sistem dan dapat mengoperasikannya dengan baik.

Kecepatan proses input dan pengolahan data

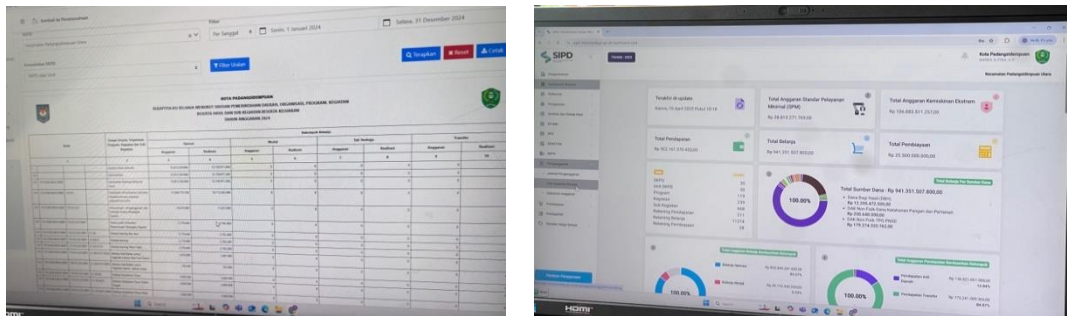


Gambar 6. Kecepatan sistem SIPD

Dalam kondisi ideal, sistem SIPD dapat memproses data dengan cepat. Namun, dalam praktiknya, kecepatan tersebut sangat bergantung pada kondisi jaringan internet

dan performa perangkat yang digunakan, dan ini juga tergantung banyaknya yang akses SIPD tersebut yang menjadi kendala error apabila terlalu banyak user. Bisa dilihat seperti gambar yang ada diatas ini diakibatkan banyak nya yang meng-akses SIPD mengakibatkan terhambatnya proses input data dan lain. Ketika komputer lambat, jaringan tidak stabil, banyak yang sedang mengakses aplikasi SIPD tersebut proses input bisa terhambat dan pekerjaan menjadi menumpuk. Selain itu, proses login dan perpindahan antar menu terkadang memerlukan waktu lebih lama dari seharusnya.

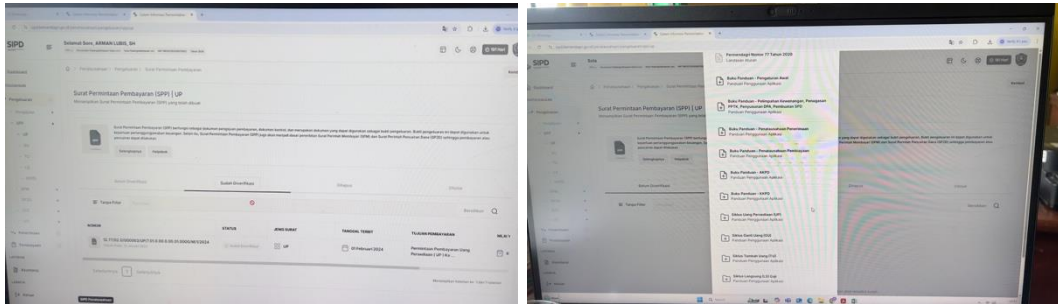
Transparansi dan akuntabilitas



Gambar 7. Data sistem SIPD

SIPD menyediakan fitur histori dan jejak perubahan data (audit trail), sehingga setiap perubahan yang dilakukan dapat ditelusuri oleh administrator atau pihak berwenang. Hal ini membantu menjaga transparansi dalam pelaporan keuangan. Namun demikian, akses terhadap informasi tersebut masih terbatas hanya pada pihak internal, dan belum sepenuhnya dapat diakses oleh publik secara terbuka. Seperti pada gambar berikut bisa dilihat total anggaran dan realisasinya, dan pada tabel dibawahnya bisa dilihat rekapitulasi belanja pada tahun 2024. Hal ini membuat tingkat transparansi belum sepenuhnya optimal di mata masyarakat luas.

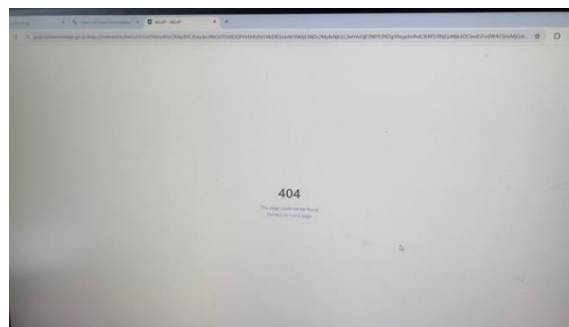
Verifikasi dan validasi data



Gambar 8. Verifikasi dan validasi data SIPD

SIPD telah dilengkapi dengan sistem verifikasi dan validasi yang cukup ketat, dan memiliki beberapa data yang perlu di upload di SIPD di mana data tidak bisa langsung dikirim tanpa melalui pengecekan dan memenuhi data yang diperlukan oleh pihak yang berwenang seperti inspektorat dan lain lain. Fitur ini sangat membantu dalam memastikan keakuratan laporan. Penulis juga ikut serta dalam proses ini, dengan membantu mencocokkan data yang diinput dengan dokumen pendukung agar tidak terjadi tidak sesuaian angka maupun uraian kegiatan.

Kendala teknis



Gambar 9. Kendala dalam sistem SIPD

Selama masa magang, beberapa kendala teknis sempat terjadi, seperti lag saat membuka beberapa modul dan kebutuhan tertentu, server down saat jam sibuk atau sedang ada pembaharuan teknis dari pusat, serta notifikasi error yang kadang tidak jelas penyebabnya. Kendala ini menyebabkan tertundanya proses input dan mengharuskan staf

menunggu hingga sistem kembali normal dan menunggu sistem tersebut kadang memerlukan waktu beberapa hari sehingga sistem dapat digunakan kembali. Solusi sementara biasanya dilakukan dengan mencatat sementara secara manual dan agar ada data cadangan yang disimpan juga sebelum kemudian diinput ulang saat sistem pulih.

Koordinasi antarbagian



Gambar 10. Koordinasi antarbagian

Dalam proses pelaporan keuangan, diperlukan data dari berbagai seksi dan unit kerja. Namun, dalam praktiknya, keterlambatan pengumpulan data dari bagian lain kerap terjadi, yang berdampak pada keterlambatan input ke dalam SIPD. Ini dikarenakan efektivitas kerja yang berada di Kantor Camat Utara Kota Padangsidimpuan belum maksimal dan masi perlu ditingkatkan lagi kinerja tiap bagiannya. Diperlukan juga sistem koordinasi dan manajemen waktu yang lebih baik antar bagian agar seluruh data yang dibutuhkan dapat masuk tepat waktu dan proses pelaporan berjalan lebih lancar.

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu

Evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Padangsidimpuan Utara Tahun Lalu. Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra), terdapat target realisasi kinerja program dan kegiatan, khususnya target realisasi kinerja program dan kegiatan untuk Tahun 2025 yang menjadi acuan evaluasi pencapaiannya. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

kegiatan/program tersebut dapat dilihat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (LAKIP).

Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil dari pelaksanaan misi organisasi. Pertanggungjawaban ini disampaikan secara berkala melalui media laporan yang transparan dan sistematis.

Rencana Strategis Kantor Camat Padangsidempuan Utara baru memasuki tahun pertama pelaksanaan, namun evaluasi terhadap RKPD Triwulan II Tahun 2024 sudah dapat dilakukan. Berikut ini disajikan evaluasi pencapaian Renstra Kecamatan Padangsidempuan Utara Tahun 2024–2026 berdasarkan realisasi anggaran dan capaian kinerja dari masing-masing program dan kegiatan:

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Kegiatan ini meliputi pelaksanaan perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja perangkat daerah.

- Total anggaran (2024–2026): Rp 56.107.200,-
- Realisasi anggaran: Rp 15.540.600,-
- Persentase realisasi: 27,70%

2. Administrasi keuangan perangkat daerah

Kegiatan ini mencakup pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah.

- Total anggaran (2024–2026): Rp 22.283.292.300,-
- Realisasi anggaran: Rp 14.980.235.127,-
- Persentase realisasi: 67,23%

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan:

1. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan

Kegiatan ini meliputi pelaksanaan perencanaan, penganggaran, serta kegiatan ini berfokus pada koordinasi antarunit dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

- Total anggaran tahun 2024: Rp 1.437.957.200,-
- Realisasi anggaran: Rp 371.437.700,-
- Persentase realisasi: 25,83%

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah di kecamatan

Kegiatan ini mencakup pelaksanaan urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan.

- Total anggaran (2024–2026): Rp 132.672.600,-
- Realisasi anggaran: Rp 38.325.000,-
- Persentase realisasi: 28,89%

Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan

Kegiatan ini bertujuan mengoordinasikan berbagai program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

- Total anggaran (2024–2026): Rp 164.865.200,-
- Realisasi anggaran: Rp 116.393.150,-
- Persentase realisasi: 70,60%

2. Kegiatan pemberdayaan kelurahan (dana alokasi kelurahan)

Kegiatan ini berupa pelaksanaan pemberdayaan kelurahan yang didanai dari dana alokasi kelurahan.

- Total anggaran tahun 2024: Rp 639.458.300,-

- Realisasi anggaran: Rp 3.568.630.700,-
- Persentase realisasi: 558,07%

Isu strategis kantor Camat Padang Sidempuan Utara

Kinerja Kantor Camat Padangsidempuan Utara Tahun 2025 tercermin dari pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan yang dirancang. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran harus spesifik, terukur, dapat dicapai, dan menggambarkan langkah-langkah nyata menuju pencapaian tujuan.

Tata kelola pemerintahan mencakup urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian, dan persandian. Permasalahan utama adalah belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi, yang dipicu oleh:

1. Rendahnya kualitas pelayanan publik (berbelit-belit, inefisiensi, lambat, tidak ramah).
2. Lemahnya implementasi kebijakan dan belum diterapkannya prinsip *good governance*.
3. Kurangnya inovasi birokrasi dan teknologi informasi.
4. Struktur organisasi yang belum adaptif.

Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan peluang dan ancaman lingkungan strategis serta kekuatan dan kelemahan Kantor Camat. Isu strategis menjadi dasar penyusunan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan prioritas lima tahun ke depan.

1. Kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung pelayanan kecamatan belum optimal.
2. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemberdayaan, ketenteraman.

Tujuan dan sasaran renja Kecamatan Padangsidempuan Utara

Program adalah kumpulan kegiatan terpadu yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dengan penentuan sumber daya yang dibutuhkan secara realistis. Untuk tahun 2025, Kantor Camat Padangsidempuan Utara merencanakan pelaksanaan beberapa program dan kegiatan prioritas, yaitu:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (100%).
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (100%).
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (100%).
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah (100%).
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (100%).
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (100%).
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (100%).
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan magang yang dilakukan di Kecamatan Padangsidempuan Utara, khususnya dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dapat disimpulkan bahwa sistem ini cukup efektif dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. SIPD mampu menyediakan wadah yang terstruktur untuk proses pencatatan, pelaporan, dan evaluasi anggaran, serta memperjelas alur pertanggungjawaban dari setiap kegiatan yang dibiayai oleh anggaran pemerintah.

Namun demikian, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal dikarenakan masih ditemukannya beberapa kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Kendala tersebut

mencakup aspek teknis seperti keterbatasan perangkat keras (*hardware*) dan infrastruktur jaringan internet yang belum merata. Selain itu, pada aspek non-teknis, masih terdapat kekurangan dalam kemampuan staf dalam mengoperasikan sistem, terutama dalam menyesuaikan data dari *Excel* ke format SIPD yang sesuai. Kurangnya integrasi otomatis juga menjadi hambatan dalam efisiensi waktu dan akurasi penginputan data.

Di sisi lain, koordinasi antar divisi yang terlibat dalam proses penginputan, verifikasi, dan pelaporan juga masih perlu ditingkatkan agar alur data berjalan lebih lancar tanpa penundaan atau kesalahan input. Hal ini menjadi penting agar SIPD tidak hanya menjadi alat dokumentasi, tetapi juga menjadi sistem pendukung keputusan yang andal.

Dengan demikian, meskipun SIPD sudah memberikan kontribusi positif dalam tata kelola keuangan di tingkat kecamatan, masih terdapat ruang untuk perbaikan agar sistem ini dapat berjalan lebih maksimal dan memberikan dampak yang lebih luas bagi efisiensi birokrasi.

Berdasarkan hasil observasi dan pengalaman selama pelaksanaan kegiatan magang, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas kerja di lingkungan Kantor Camat Padangsidempuan Utara, khususnya dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pertama, disarankan adanya pelatihan lanjutan bagi para staf kecamatan agar semakin terbiasa dan mahir dalam mengoperasikan SIPD, mengingat sistem ini memiliki peran penting dalam pengelolaan data dan informasi pemerintahan daerah. Selain itu, peningkatan infrastruktur teknologi informasi, seperti penyediaan perangkat komputer yang memadai dan jaringan internet yang stabil, juga menjadi aspek penting untuk mendukung kelancaran operasional sistem.

Selanjutnya, perlu dilakukan pengembangan integrasi data secara otomatis dari format *Excel* ke SIPD agar proses input data menjadi lebih efisien dan minim kesalahan.

Upaya ini juga harus dibarengi dengan peningkatan koordinasi antar divisi di lingkungan kecamatan guna mempercepat alur pengolahan data serta proses validasi informasi. Terakhir, perlu adanya evaluasi berkala terhadap penggunaan SIPD untuk memastikan bahwa sistem tetap relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan operasional pemerintahan di tingkat kecamatan.

Untuk mendukung keberlanjutan dan peningkatan efektivitas penggunaan SIPD di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, kegiatan pengabdian selanjutnya dapat difokuskan pada pendampingan intensif bagi para operator SIPD melalui program pelatihan berbasis praktik langsung (*on-the-job training*). Selain itu, tim pengabdian dapat merancang modul pelatihan yang spesifik untuk kebutuhan lokal, termasuk cara konversi data dari Excel ke format SIPD yang sesuai.

Kegiatan pengabdian juga dapat mencakup asesmen kondisi infrastruktur digital di kantor kecamatan untuk memberikan rekomendasi pengadaan atau peningkatan perangkat teknologi. Selain itu, disarankan dilakukannya *coaching clinic* berkala yang melibatkan lintas divisi untuk memperkuat koordinasi dan pemahaman bersama terkait alur kerja SIPD.

Sebagai bentuk kontribusi lanjutan, kegiatan pengabdian dapat pula mencakup penyusunan panduan teknis penggunaan SIPD yang mudah dipahami, serta pendampingan dalam penyusunan sistem evaluasi kinerja penggunaan SIPD di tingkat kecamatan. Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia dan efisiensi kerja secara berkelanjutan.

PENGHARGAAN

Kegiatan magang ini didukung oleh pendanaan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Pemerintahan Dalam Negeri, melalui program pembinaan mahasiswa magang tahun 2025. Dana tersebut digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, termasuk transportasi, akomodasi, dan keperluan dokumentasi di lapangan. Penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya disampaikan kepada Pemerintah Kota Padangsidimpuan, khususnya kepada Bapak Camat Padang sidimpuan Utara beserta seluruh staf yang telah memberikan dukungan, arahan, dan akses informasi selama pelaksanaan kegiatan magang. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidimpuan atas penjelasan teknis mengenai penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik dalam bentuk pendampingan, diskusi teknis, maupun berbagi pengalaman di lapangan. Dukungan dari pihak-pihak tersebut sangat membantu dalam memperkaya pemahaman dan analisis terhadap efektivitas SIPD sebagai alat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrif, NFN. (2019). “Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Daerah Dalam Memantapkan Kedudukan Dan Fungsi Bahasa Indonesia.” *MABASAN* 4(1).
- Balqis, Nadya, and Zuhrizal Fadhly. (2021). “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Di Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (Distranaker) Kabupaten Aceh Barat.” *Jurnal Public Policy* 7(2).

- Balqis, Nadya, Zuhrizal Fadhly, and Maulyanda Az. (2021). "Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat." *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 11(1).
- Ekaputra, Nanda Dias. (2021). "Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD DI Kabupaten Nganjuk." *Otonomi* 21(1): 62–79.
- Fitriaty, Fitriaty, and Muhammad Haris Saputra. (2022). "Inflasi, Suku Bunga Dan Resesi Terhadap Kinerja Saham Perusahaan Properti Dan Real Estate Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan* 11(04).
- Imam, Imam Agus Faisol et al. (2023). "Aktivitas Pengisian Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Di Sekterariat Daerah Kabupaten Sumenep." *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 3(4).
- Naida, Nasrun, and Dewi Sartika. (2024). "Tantangan Dan Strategi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berkualitas Dengan SIPD: Studi Kualitatif Di Kabupaten Tojo Una-Una." *Kajian Ekonomi dan Bisnis* 19(2): 99–109.
- Nasution, Muhammad Irfan, and Nurwani M.Si. (2021). "Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 9(2).
- Rizki, Achmad Choirul, and M Sarjan. (2025). "Analisis Pelatihan Sumber Daya Manusia Pada Aparatur Sipil Negara Di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi." *JUHANPERAK* 6(1): 1–9.
- Sundari, Sundari, Sri Juni Woro Astuti, and Esa Wahyu Endarti. (2024). "Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kabupaten Probolinggo." *MAP (Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik)* 6(4).

Vitriana, Nidya, Agustiawan Agustiawan, and Muhammad Ahyaruddin. (2022).

“Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru.” *Digital Business Journal* 1(1).

Wuryandanu, Hadi, and Zaenal Arifin. (2024). “Wewenang Dewan Perwakilan Daerah

Dalam Memperkuat Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Hukum dan Demokrasi (HD)* 24(4): 265–87.